

**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DALAM PENERTIBAN TAMBANG EMAS
(Studi di Kanagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

ANTONIUS
67918

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

ABSTRAK

Antonius. Peranan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Penertiban Tambang Emas, Skripsi, Jurusan Ilmu Sosial Politik-FIS UNP Padang, 2012

Penambangan emas berisiko, dan memakan korban jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan tambang. Seperti yang pernah terjadi, penambangan emas telah menelan 11 orang penambang yang meninggal karena tertimbun longsoran lubang tambang di Kecamatan Sangir. Secara umum, para penambang emas mengatakan bahwa gejala-gejala kesehatan yang sering timbul antara lain penyakit gatal-gatal, sakit perut, mual, muntah-muntah, demam, pilek, sesak napas pusing-pusing, sakit kepala, maag, tangan sering kesemutan dan mudah lupa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran serta upaya pemerintah dalam menertibkan penambangan emas di Kanagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sengaja). Uji keabsahan data dengan teknik ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan dan teknik triangulasi data dianalisis melakukan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan fisik seperti kerusakan alam, pencemaran air dan tanah serta lingkungan sosial yang menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Peranan pemerintah kabupaten dalam penertiban penambangan emas telah membuat kebijakan dengan membentuk Tim Penertiban Penambangan Emas dan menjalin koordinasi dengan instansi pemerintahan yang terkait serta unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, mereka telah dilibatkan dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berbagai peraturan kepada penambang untuk memiliki izin penambangan. Selain itu penertiban penambangan emas juga dilakukan secara represif oleh pihak penegak hukum (*law enforcement*). Solusi untuk memecahkan masalah penambangan tanpa izin dengan melakukan komunikasi yang baik dan lancar antar instansi pemerintah dan bekerja sama dalam mencari solusi alternatif serta mempertimbangkan aspek dan fenomena sosiologis yang ada dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pencipta, alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penulis bisa, menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Penertiban Tambang Emas”**. Shalawat dan salam turunkan kepada, Rasulullah SAW. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Maka, dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima, kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. Karjuni Dt.Maani M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Henni Muchtar, SH, MH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, f&dran, dan kesabaran untuk membimbing serta, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada dosen penguji yaitu Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D, Drs. Syamsir, M.Si, dan Drs. Ideal Putra, M.Si.

2. Bapak/Ibu Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta staf dan karyawan/ti yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi untuk penelitian ini.
3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik ibuk Henni Muchtar, SH, M.Hum Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial.
5. Bapak/Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan penuh keramahan.
6. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan dengan keramahan.
7. Teristimewa buat Orang tua, adik dan keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan, semangat, do'a dan pengorbanan materi dan non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat dan rekan-rekan senasib yang sama-sama menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang serta semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT, Amin.

Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Kerangka Konseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	23
C. Sumber Informan Penelitian.....	23
D. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Menguji Keabsahan Data	30
F. Analisa Data	31
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	32
B. Temuan Khusus	35
1. Upaya Pemerintah Solok Selatan dalam Menertibkan Penambangan Emas	35

2. Peran Pemerintah Solok Selatan dalam Menertibkan Penambangan Emas	39
C. Pembahasan	47
1. Upaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Penambangan Emas di Kanagarian Lubuk Gadang	65
2. Peranan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Penambangan Emas di Kanagarian Lubuk Gadang	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Informan Penelitian	24
2. Teknik Pengumpulan Data	29
3. Jumlah Penduduk yang Bekerja Pada Beberapa Jenis Lapangan Usaha Di Nagari Lubuak Gadang	34

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual Penertiban Penambangan Ema	20
2. Peta Lokasi Penelitian	33
3. Garis Koordinasi Antar Instansi	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin dari Fakultas
2. Surat Izin dari Kesbangpol
3. Surat Izin selesai Penelitian dari ESDM Solok Selatan
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Camat Sangir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan yang mengatur penambangan emas yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat pertambangan emas rakyat, Pasal 1 peraturan ini menyatakan bahwa kegiatan penambangan emas rakyat adalah suatu usaha penambangan emas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Dalam peraturan tersebut untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka pemberian pembinaan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu daerah yang mempunyai tambang emas di Propinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok Selatan. Penambangan emas tersebar di Kecamatan Sangir, sebanyak 40 buah tambang emas, yang merupakan bekas peninggalan Belanda. Tambang emas tersebut terdapat di Pamong Gadang, Jorong Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang. Kegiatan penambangan emas ini dilakukan di sepanjang aliran Sungai Pamong Gadang dan Pamong Ketek yang dijadikan sebagai lahan penambangan emas.

Dilihat dari lokasinya, penambangan emas di Kecamatan Sangir ada yang dilakukan di daratan dan ada juga yang dilakukan di sungai. Secara administrasi,

penambangan emas di sungai tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah (Pemerintah Kabupaten Solok Selatan). Padahal sudah ada peraturan yang menjadi acuan dalam kegiatan pertambangan. Peraturan tersebut adalah: (1) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan, pascatambang.” Mineral yang dimaksud di atas, termasuk emas, tembaga, bauksit dan lain-lain, (2) PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan. Dalam hal ini “wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batas administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional”; (3) PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara “pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri”; (4) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; (5) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 121.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan.

Berdasarkan data yang ada tahun 2011, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan mencatat ada sekitar 80 pemilik penambang emas di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, diantara penambang emas tersebut

32 memiliki mesin dompeng, 1 memiliki londong, 46 melakukan secara tradisional dengan mendulang, dan melakukan eksplorasi besar-besaran. Kalau ini dibiarkan akan terjadi kerusakan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Penambangan emas juga berisiko, dan memakan korban jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan tambang. Seperti yang pernah terjadi, penambangan emas telah menelan 11 orang penambang yang meninggal karena tertimbun longsoran lubang tambang di Kecamatan Sangir.

Disamping itu, para penambang emas yang mengelola biji emas dengan menggunakan merkuri di perairan Sungai Pamong Ketek dan Pamong Gadang sebagian besar mengatakan bahwa gejala kesehatan yang timbul pada tubuh penambang emas yang terkontaminasi merkuri tidak langsung atau dirasakan pada saat itu juga. Secara umum, para penambang emas mengatakan bahwa gejala-gejala kesehatan yang sering timbul antara lain penyakit gatal-gatal, sakit perut, mual, muntah-muntah, demam, pilek, sesak napas pusing-pusing, sakit kepala, maag, tangan sering kesemutan dan mudah lupa.

Dengan demikian peranan pemerintah dalam penertiban penambangan liar emas sangat diperlukan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan emas untuk tidak melakukan penambangan di sempadan sungai atau bantaran sungai, membatasi kedalaman penggalian, mengisi kembali kolong penambangan yang telah ditinggalkan, menghindari penggunaan merkuri atau sianida, tidak langsung membuang lumpur pencucian ke sungai atau rawa.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan peranan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penertiban tambang emas.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

1. Resiko kerusakan lingkungan akibat penambang yang dilakukan masyarakat sangat tinggi.
2. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan emas, khususnya bagi kondisi kesehatan para penambang.
3. Kurangnya peranan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dalam pemulihan lingkungan akibat penambangan emas.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada upaya dan peranan pemerintah dalam penambangan emas di Kanagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penertiban Tambang Emas di Kanagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir ?

2. Apa saja peranan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penertiban Tambang Emas di Kanagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah daerah dalam menangani penambangan emas di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu memberikan penyuluhan kepada penambang emas tentang keselamatan kerja, bekerja sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan serta menertibkan pelaku penambangan emas diluar aturan yang telah dibuat.
2. Peranan pemerintah dalam penertiban penambangan emas. Adapun peranan pemerintah dalam melakukan penertiban penambangan emas sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab mengatur aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan agar penambangan emas berjalan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya penyebab banyaknya penambangan emas di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan peranan pemerintah dalam penertiban penambangan emas di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami kebijakan kelestarian lingkungan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pengambil kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan kelestarian lingkungan.
3. Memberi masukan bagi peneliti lanjutan yang ada kaitannya dengan kebijakan pertambangan emas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan peranan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penertiban tambang emas adalah sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menangani permasalahan penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan yaitu melakukan koordinasi antar instansi yang terkait dalam Penertiban Penambangan Emas, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan sosialisasi status lahan penambangan emas dan konsistenan Pemerintah Kabupaten dalam Penertiban penambangan emas.
2. Peran pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menertibkan penambangan emas di Kanagarian Lubuk Gadang adalah dengan membentuk tim penertiban penambangan emas, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penambangan emas yang baik, serta melakukan penertiban di kalangan para penambang emas, sehingga dampak negatif penambangan dapat diminimalisir.

B. Saran

Diharapkan pada perangkat pemerintah Kabupaten Solok Selatan beserta penambang dan masyarakat dapat menegakkan peraturan pertambangan sehingga dampak negatif dari penambangan bisa

ditanggulangi. Agar hal itu tercapai, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan konsekuen dan tegas dalam menerapkan peraturan yang telah disepakati dan penambang patuh pada aturan hukum yang sebenarnya demi kebaikan bersama.

Dalam melaksanakan penertiban, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebaiknya menjalin komunikasi yang baik dan lancar antar instansi pemerintah, unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, dan selanjutnya bekerja sama dalam mencari solusi alternatif serta mempertimbangkan aspek dan fenomena sosiologi yang ada dalam masyarakat sehingga kebijakan penertiban yang dilakukan dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfitri. 1994. Teori Sosiologi Klasik (I). Padang: Universitas Andalas
- Afrizal. 2005. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan. Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND
- 2005. Metode Penelitian IL Padang : Jurusan Sosiologi. FISIP UNAND.
- Arifin, Imron. 1996. Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan. Jakarta.
- Burhan, Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitati: Metodologis Ke arah Ragam Varian Kontemporer . Jakarta: Rajawali Pers
- Haris, Samsuddin, dkk. 2004. Desentralisasi dan otonomi Daerah : Naskah Akdemik Dan RUU usulan LIN. Jakarta: LIPI Press
- Johnson.P.Doyle,1986. Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 1. Terj. Robert M.Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- 1986. Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 2. Terj. Robert M.Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Manan, B dan A. Saleng. 2004. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: Ull Press
- Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
- Rasda Karya. Poloma.Margaret. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purba, Jonny. 2005. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rachmad K. 2008. Sosiologi Lingkungan. Jakarta: Rajawali Pers
- Ritzer, George dan Douglas J Doodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana
- Ritzer, George. 1992. Sosiologi Rmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Pers.